



HB X Pertanyakan Aliran Uang Sewa

Bangunan yang Digunakan Pedagang di Jalan Perwakilan

JOGJA, Radar Jogja - Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Perwakilan dipastikan ilegal atau tak berizin. Selama ini, mereka menggunakan tanah milik Keraton Jogjakarta tanpa membayar sewa. Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X

pun pertanyakan aliran dana sewa selama ini. HB X menegaskan tanah dan bangunan yang ada merupakan milik Keraton Jogja, bukan milik Pemprov DIJ. "Kuncinya di keraton yang perpanjang hanya di sebelah barat, lainnya nggak punya izin semua. Nggak tahu mereka bayar ke siapa kalau sewa le buka biyen pie? wong kuncinya di (GKR) Mangkubumi," katanya di Kompleks Kepatihan kemarin (3/1) ■ [Baca HB X... Hal 7](#)

HB X Pertanyakan Aliran Uang Sewa

Sambungan dari hal 1

Raja Keraton itu menjelaskan pihak Keraton Jogja tidak pernah memberi izin melalui surat kecancingan agar para pedagang dapat membuka usaha di kawasan tersebut. Sebab, Jalan Perwakilan merupakan tanah kasultanan atau *Sultanat Ground*.

Jalan Perwakilan pun sempat dikosongkan dari aktivitas perdagangan sebelum pandemi Covid-19. Keraton Jogjakarta juga tidak memperpanjang surat kecancingan untuk pemanfaatan lahan di kawasan tersebut kecuali pada bangunan sebelah barat atau Restoran Legjan di Malioboro.

Namun, bangunan di Jalan Perwakilan hingga saat ini masih digunakan untuk berjualan oleh pedagang. HB X pun tidak mengetahui bagaimana pedagang bisa berjualan di sana meski bangunan-bangunan di kawasan itu sudah dikunci.

Ayah lima puteri itu pun mempertanyakan pelaku usaha yang mengaku membayar sewa. HB X tidak mengetahui ke mana uang sewa itu mengalir dan siapa pihak yang menyewakannya. Padahal, para pedagang sudah diminta pindah dan mengosongkan. Pihak Keraton pun menguncinya. Tinggal bangunan yang sebelah barat yakni Restoran Legjan yang masih

ada. "Pada bisa masuk ke situ saya diam saja. Itu (mereka) membongkar atau apa. Kalau ada yang nantik duit (uang sewa) siapa yang menarik, pada bayar ke siapa," tanyanya.

Dengan begitu, kawasan tersebut sebetulnya bisa segera dikosongkan. Karena mereka tak berizin. Pun Pemprov DIJ akan membangun Jogja Planning Gallery (JPG) di kawasan Jalan Perwakilan dan DPRD DIJ.

Namun, HB X siap bertemu dengan pedagang Jalan Perwakilan yang informasi sebelumnya telah mengirim surat terbuka kepadanya. "Katanya mau ketemu sama saya tapi saya belum baca suratnya. Kalau dia benar mau ketemu sama saya, saya tanya berani nggak mengeluarkan pernyataan duit (sewa) itu kalau keluar buat yang nyewa itu siapa," tambahnya.

Sementara itu pelaku usaha di jalan perwakilan mengaku sudah menerima surat edaran pengosongan lahan di sisi utara. Para pedagang yang tergabung dalam Forum Komunikasi dan Koordinasi Perwakilan (FKKP), berusaha untuk tetap bisa beroperasi di lokasi yang akan dibangun JPG.

Koordinator FKKP Adi Kusuma Putra Suryawan bermaksud menemui Penjabat (PJ) Wali Kota Sumadi kemarin, untuk membahas pengosongan lahan di sisi utara jalan perwakilan. "Surat

edarannya (terkait pengosongan lahan, Red) baru tadi pagi (kemarin pagi, Red) diberikan," lontarnya.

Adi mengaku siap datang ke kantor gubernur, jika tidak mendapat respon. Sebab, kelompoknya masih berharap dapat diberi perpanjangan waktu, untuk mengais nafkah di jalan perwakilan. "Soalnya SE turun tanggal 3 Januari 2023 harus kosong. Nanti malam mungkin mereka akan melakukan pengosongan (dilakukan pembongkaran, Red)," ucapnya.

Dihubungi terpisah, Sumadi enggan berbicara banyak karena mengaku sedang sakit gigi. Namun dia memastikan pengosongan lahan di sisi utara Jalan Perwakilan terus berproses. "*Lajeng nolak piye* (pelaku usaha mau menolak bagaimana). *Donga ke wae niki* (mohon doanya) bisa lancar gampang. Ini buat kepentingan semua warga Jogja," paparnya.

Terkait keinginan pelaku usaha untuk mengaku pada Gubernur DIJ, Sumadi pun mempersiapkan. "*Ndak papa*, kar: beliau pimpinan. Warga bisa ketemu pimpinan. Monggo saja," cetusnya. Namun Sumadi mempertanyakan, langkah yang ambil oleh pelaku usaha itu apakah sesuai prosedur. Lantaran langsung melompat ke pimpinan provinsi. Tanpa terlebih dahulu berembuk di daerah. (waf/fat/bah/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005